



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

SELASA, 23 MARET 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

PEMOHON

M. Husni, Sutarto Rangkayo Mulie, Nelly Armida,

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Maret 2021, Pukul 09.09 WIB – 10.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

1. M. Husni
2. Nelly Armida
3. Sutarto Rangkayo Mulie

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Henny Handayani
2. Hendrajoni

C. Kuasa Hukum Termohon:

Sudi Prayitno

D. Termohon:

1. Lili Suarni (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Febriani (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Izwaryani (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)

E. Bawaslu:

1. Erman Wadison (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Arieski Elfandi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nurmadi (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
5. Syafrijal Chan (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)

F. DPR:

Lisda

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Sebelum saya minta untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir, perlu saya sampaikan bahwa dalam persidangan ini berlaku ketat protokol kesehatan, ya. Sehingga masker harus dipakai yang benar. Itu Kuasa Hukum yang putra ... yang laki ... nah, dipakai yang betul. Nanti kalau enggak, yang disemprot nanti Saudara nanti. Ya, yang lain juga. Kemudian, durasi persidangan juga kita supaya efisien dan efektif. Kalau sudah melebihi dari 2 jam, maka kita akan break supaya ruangan ini bisa disterilkan kembali, ya. Selain protokol kesehatan, maka berlaku Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah Saudara ketahui bersama.

Baik, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Saya adalah Kuasa Hukum dari 3 Pemohon dari Pesisir Selatan. Bapak M. Husni, Pak ... Bapak H. Sutarto Rangkayo, dan Bapak ... eh, dan Ibu Nelly Armida. Nama saya Henny Handayani, S.H., M.H. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini Pak ... anu ... siapa yang hadir ini ... Pak siapa? Prinsipal?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Prinsipal.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa namanya yang hadir?

8. PEMOHON: M.HUSNI

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

10. PEMOHON: M.HUSNI

Yang Mulia, Majelis Hakim, akan memperkenalkan diri. Saya nama M. Husni (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pak Husni, ya?

12. PEMOHON: M.HUSNI

Ya. Perwakilan Prinsipal dari masyarakat.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

14. PEMOHON: M.HUSNI

Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang hadir secara daring tidak ada? Siapa? Siapa itu? Pak Hendrajoni, Pak Hamdanus, Bu ... anu ... Pak ... Pak ... Bu Lisda?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ibu Lisda, Pak Hamdanus, Pak Hendrajoni, Ibu Nelly, dan Bapak Sutarto.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terima Kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang Pak Hendrajoni, Pak Hamdanus, dan Ibu Lisda tidak bisa hadir dalam persidangan ini karena, kan, tidak tercantum dalam Permohonan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Oh, ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan menjadi Pihak, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya ... ya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi yang menjadi Prinsipal Pak ... Pak Husni, Pak Tarto, dan (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ibu Nelly.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ibu Nelly?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang bisa hadir, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tolong secara disiplin jangan hadir meskipun dalam daring juga tidak boleh hadir.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Oh, siap.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah di ... anu ... Panitera, Pak ... enggak boleh hadir, ya. Karena yang hadir dalam persidangan adalah semua Pihak yang terkait dengan perkara ini, ya.

Baik. Termohon, siapa yang hadir? Silakan!

34. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb. Terima Kasih, Yang Mulia. Termohon dalam Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 hadir saya sendiri Kuasa Hukum Sudi Prayitno, S.H., LL.M., bersama Ibu Lili Suarni, Divisi Hukum

dan Pengawasan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan secara daring, hadir rekan kami Johny Hendri Putra, S.H., selaku Kuasa Hukum, bersama Ibu Febriani dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan, didampingi Bapak Izwaryani dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain secara daring tadi?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang hadir di sini (...)

38. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Saya sendiri (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selain Pak Sudi, Bu Lili?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Bawaslu, siapa yang hadir?

42. BAWASLU: ERMAN WADISON

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

44. BAWASLU: ERMAN WADISON

Izinkan, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir pada sidang hari ini saya Erman Wadison, Ketua Bawaslu Kabupaten Selatan dan didampingi oleh Bu Yani Rahma Sari Koordiv. Divisi Hukum dan Informasi. Dan juga secara daring dihadiri oleh Bapak Nurmaidi, Arieski Elfandi, dan Syafrijal Chan. Terima Kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda pertama yang dalam persidangan ini ... pagi hari ini adalah penyampaian secara lisan Permohonan dari Pemohon, ya. Kemudian, perlu saya beritahukan bahwa Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 13.43 WIB, teregister dengan Nomor Perkara 136/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Jadi, Permohonan secara tertulis sudah kita terima dan Majelis sudah ... Majelis Panel sudah membaca. Oleh karena itu tidak perlu disampaikan secara keseluruhan ya, disampaikan saja. Saya minta untuk disampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja.

Yang pertama, nama principal. Kemudian Kuasa Hukumnya, kemudian apakah itu menyangkut kewenangan Mahkamah yang bagaimana? Kemudian legal standing-nya, kemudian mengenai tenggang waktu, dan yang terakhir mengenai posita dan petitumnya, ya. Pokok-pokoknya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, ya. Kenapa punya legal standing dan sebagainya?

Saudara juga sudah mengajukan perbaikan permohonan, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah, Pak.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah, Pak.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan Permohonan diterima tanggal 22 Maret?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, Pak.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

22 Maret 2021 pada pukul 10.01 WIB, ya? Silakan Saudara menyampaikan Perbaikan Permohonan ini. Apakah perbaikan ini sudah ... masih memenuhi tenggang waktu atau tidak? Nanti akan kita lihat dan kita nilai, ya. Silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia. Perbaik- (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan Perbaikan Permohonan 2 kali?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, Pak. Oleh karena petikannya baru bisa diberikan oleh Pengadilan Padang, telat. Jadi pertama bukti online, kedua, petikan. Jadi kita mengajukan perbaikan karena adanya petikan, Pak.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Petikan yang sudah diberikan oleh Pengadilan Padang ... petikan putusan terpidana.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya sudah. Nanti kita yang menilai, ya? Perbaiki Permohonan atau dokumen mana yang akan kita pakai untuk mengadili permohonan ini, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita akan lihat.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang penting intinya dari permohonan ini sejalan. Silakan Saudara sampaikan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Intinya dari permohonan ini adalah agar Mahkamah Konstitusi sebagai the positive legislators melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidananya Bapak Drs. Rusma Yul Anwar M.Pd., Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat bukti online Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021, register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tentang Ditolaknya Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar.

Sehubungan dengan itu, maka status terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020, maka pencalonan Drs. Rusma Yul Anwar M.Pd., atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah cacat hukum. Sejak kasasi yang bersangkutan sampai di MA tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 20 ... tanggal 4 Januari 2020 perkara tersebut tidak teregister, berarti status terpidana. Maka sesuai dengan Pasal 250 ayat (2) dan (5), maka KPU

tidak mempunyai dasar dan KPU tidak dapat dibenarkan meluluskan atau menetapkan orang tersebut sebagai (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Calon Bupati Pesisir Selatan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berhenti di situ dulu. Pertanyaan saya, yang menjadi objek dari per ... permohonan ini apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Untuk supaya ... permohonannya adalah agar Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator melakukan penemuan hukum (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Objeknya apa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Mengatasi kebuntuan kekosongan sehubungan dengan status terpidananya Drs. (...)

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kok mengatasi kebuntuan, objeknya. Objeknya dalam perkara pilkada itu apa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Membatalkan. Membatalkan calon (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kok membatalkan calon. Apa sih yang dibatalkan itu apanya? Kalau membatalkan calon kan bukan ... anu ... itu substansinya, tapi yang menjadi objek.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Membatal ... membatalkan per ... permohonan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah itu yang dimaksud dengan objeknya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Pak.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi objeknya, putusan 259?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya. Terus (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 September 2020.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang 259, tentang apa?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tentang Nomor Urut Pasangan Calon.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tentang pasangan calon?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Yang Mulia, ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

261, tentang?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

261 tentang Nomor Urut, kalau 25 ... 259 tentang Penetapan Pasangan Calon.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi itu objeknya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, objeknya. Sama pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sebetulnya yang menjadi objek itu hanya 368. Hasil rekapitulasi ... penetapan hasil rekapitulasi. Karena kan ... apa ... perselisihan perolehan suara dalam pilkada kan objeknya, hasil penetapannya. Kalau yang penetapan yang di atas-atas itu nanti konsekuensi dari ini dibatalkan menyangkut itu, ya. Ini yang Anda masukkan di nomor berapa itu, yang 368?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

386 yang untuk permohonannya di nomor 4, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang d itu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus. Oleh karena itu Mahkamah berwenang menurut Anda?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Mahkamah sebagai positif legislator berhak membatalkannya.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus! Ini Pemohon punya legal standing?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pemohon punya legal standing, Pak.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa punya legal standing?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pemohon punya legal standing.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penjelasan kenapa Pemohon atas nama 3 orang tadi prinsipal, Pak Husni, Pak Karto, dan Bu Nelly itu kenapa punya legal standing? Penjelasannya gimana?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya. Sejauh ini sesuai ketentuan Pasal 2 permo ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang cara ... Tata Cara Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Wali Kota ... Wali Kota ... objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dan ... dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 menyatakan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilih adalah pasangan calon gubernur/wakil gubernur, pasangan calon bupati/wakil ... pasangan calon (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, tadi kan itu disebutkan pasangan calon, kan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, atau pemantau pemilihan dalam halnya hanya terdapat 1 pasangan calon.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Sekarang apakah prinsipal yang 3 orang itu pasangan calon? 1 pertanyaannya. Yang kedua, apakah 3 orang itu pemantau?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pemantau, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemantau (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Bahwa sekalipun demikian (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar ... sebentar!

112. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan diteruskan dulu.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah pemantau?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pemantau.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di Padang itu ini kan dimana? Pesisir?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Di Pesisir Selatan.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pesisir Selatan, calonnya ada berapa?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Calonnya ada 3.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

3, kalau 3 ada pemantau enggak?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Semuanya masyarakat di sana memang berhak untuk memantaunya, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Syarat pemantau itu apa menurut PMK dan menurut kp ... KPU? Apakah pemantau terdaftar, punya sertifikat sebagai pemantau? Lah

kalau semua masyarakat kemudian diberi kewenangan sebagai pemantau, kacau nanti pilkada.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pada Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan memiliki legal standing (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, teruskan kalau begitu.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang dicerai hak konstitusinya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, adil melalui pemilu yang bermartabat, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau gitu, itu menurut Saudara, ya. Nanti Mahkamah yang akan menilai dan nanti KPU dan Bawaslu nanti bereaksi, ya. Terus, silakan! Sekarang tenggang waktunya. Saudara mengajukan permohonan yang pertama, kemudian ada perbaikan yang kedua, per ... perbaikan ada perbaikan pertama dan perbaikan kedua. Mengenai tenggang waktu pengajuan ini, mana yang memenuhi persyaratan? Atau sebutkan! Kita sudah punya catatan. Permohonan yang pertama tanggal sekian, permohonan perbaikan yang pertama tanggal sekian, perbaikan yang kedua tanggal sekian. Nah, menurut Saudara yang harus dipakai untuk mengadili perkara ini yang mana? Perbaikan yang terakhir atau perbaikan yang pertama? Atau yang Amar Permohonannya? Kan kita harus jelas, permohonan yang akan dipakai dalam permoho ... apa ... perkara ini yang mana menurut Saudara? Nanti juga bisa KPU, Termohon, dan Bawaslu bisa mempunyai komentar mestinya yang dipakai yang ini menurut peraturannya, Mahkamah juga nanti akan menilai. Yang mana menurut Saudara? Silakan dijelaskan!

128. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia. Ini sebenarnya tenggang waktu adalah 3 hari kerja terhitung sejak penetapan su ... perolehan suara hasil oleh Termohon. Akan tetapi karena keputusan dari MA itu di online itu hanya baru bisa dilihat tanggal 24 dan juga petikannya baru, jadi saya ... kami

di sini sebagai Kuasa Hukum, memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the positif legislator untuk memberikan temuan hukumnya dalam hal ini, Pak, gitu Pak, Yang Mulia (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu permohonan Saudara?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang ada 3 permohonan itu, mana? Jadi, Anda meminta Mahkamah menyimpangi tenggang waktu dari apa yang sudah diputuskan dalam penetapan. Kan begitu, kan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sekarang ada 3 permohonan. Nah, permohonan yang diminta yang dipakai itu yang mana?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Kami meminta yang dipakai yang terakhir, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ini kita bicara permohonan yang terakhir, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu sekarang, dalil-dalil atau posita yang Anda minta yang terakhir itu bagaimana? Silakan sampaikan pokok-pokoknya!

140. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pokok permohonan.

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggara. Antara lain Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut.
 - b. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 - c. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
 - d. Pemilihan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Wakil Bupati Pesisir Selatan ... Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2021.
 - e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 30/PL.02-7PU/1301/KPU-Kab/II/2021.
2. Fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas. Dalam hal ini adalah murni kela ... kelalaian atau kesalahan Termohon.
3. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum pasangan

calon bupati lainnya untuk terlibat di dalam pemerintahan sebagai calon bupati dan wakil bupati di dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dan ini an ... sangatlah tidak adil.

4. Bahwa fakta status Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sebagai terpidana dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 juga melanggar hak calon pasangan lainnya untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan terpidana yang bernama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. sebagai calon Bupati dari Paslon Nomor 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf b sampai dengan m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya.

Pasal 7 ayat (10) Undang-Undang 10/2016 menyatakan bahwa setiap warga negara dicalonkan sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10/2016 menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persara ... persyaratan sebagai berikut (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang lain dianggap dibacakan. Sekarang, petitumnya!

142. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan sela.

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon.
2. Membatalkan pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus ... kasus-kasus keras yang sulit atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi atau preseden.
2. Menyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan, dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-KPT/1301/KPU Kabupaten/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasar hukum, dan bersifat melawan hukum, dan karenanya membatalkan Keputusan pemilis ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 September 2020.
5. Menyatakan tidak sah, dan tidak berdasar hukum, bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.027-PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.

6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si., di dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 dan menyatakan batal demi hukum.
7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan peraih suara terbanyak kedua, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, M.Si., sebagai pasangan bupati terpilih Pesisir Selatan 2020.
Atau
8. menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan keputusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Henny Handayani, S.H, M.H, Jhonny Pratama, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih.
Yang Mulia Pak Manahan, ada? Berikutnya, Yang Mulia, Pak Manahan. Kemudian nanti Pak Daniel, ya. Saya persilakan!

146. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Kepada Pemohon, ya, tadi sudah ditanggapi oleh Pak Ketua Panel mengenai soal objek tadi, ya. Namun di sini memudahkan objek Permohonan itu tadi dari SK penetapan calon, penetapan nomor urut, dan seterusnya, sampai keputusan rekapitulasi. Nah, itu, jadi ada hal

yang mesti dipertanyakan di situ, sebenarnya yang mana objek daripada Permohonan itu, ya?

Kemudian juga mengenai Legal Standing, sudah tadi dipertanyakan, bagaimana sebenarnya kepentingan dari Prinsipal ini dalam perkara ini. Sudah dijelaskan tadi itu, "Bukan peserta pilkada, bukan sebagai pemantau, dan lain sebagainya." Cuma tadi menafsirkan seluruh orang bisa memantau. Nah, itu. Menjadi hal yang perlu diperjelas.

Kemudian tadi juga mengenai soal ... Ibu mengatakan, "Terjadi cacat formil." Nah, hubungannya dengan itu, saya mau bertanya, tadi masih kurang jelas kapan itu si ... Pak Ruslan, ya? Itu ditetapkan ... saya ulangi, Pak Rusma Yul Anwar itu, kapan itu ditetapkan sebagai tersangka? Kapan ditetapkan sebagai terdakwa? Kapan dia sebagai terpidana? Ini penting. Jangan asal Ibu seluruhnya raup semua, sehingga ... wah dia sudah tidak pantas. Begitu, ya? Jadi harus jelas kapan itu sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana? Kalau terpidana tadi hanya Ibu menjelaskan adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasusnya, yaitu putusan tanggal 24 Februari, ya kalau enggak salah, ya? Begitu, Bu?

147. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, betul, Pak.

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menurut Ibu di situ apa statusnya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Jadi, kalau ... karena dari pengadilan negeri dia sudah diputus, berarti kan statusnya terpidana.

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, belum, ya belum (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dari, dari (...)

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah diputus pengadilan negeri apa statusnya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah terpidana, Pak.

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, dari mana tahu?

155. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Karena setelah diputus itu orang tersebut statusnya sudah terpidana.

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Banding enggak dia berarti? Banding, ya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dia banding ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi (...)

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah, ya, apa terpidana itu?

159. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terpidana, Pak.

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, menurut Anda begitu?

161. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya. Terus habis gitu dia juga ke Mahkamah Konstitusi ... eh, ke Mahkamah (...)

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mahkamah Agung?

163. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Untuk kasasi, Mahkamah Agung, untuk kasasi. Dan itu juga terpidana dan ditolak. Dengan ditolaknya beliau, berarti sejak keputusan pengadilan tinggi sejak Juni beliau sudah statusnya terpidana.

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kenapa enggak dihukum? Kalau terpidana kan dihukum, dieksekusi.

165. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Kalau untuk permasalahan itu silakan menanyakan ke pengadilan tinggi.

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi Ibu jangan menafsirkan sembarangan, harus jelas, ya, harus jelas ininya bahwa dia tersangka, terdakwa, terpidana.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya sela sebentar, Yang Mulia. Pertanyaannya Yang Mulia Pak Manahan itu begini, kapan putusan itu inkraacht? mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang sudah tidak bisa dilakukan upaya apa-apa lagi. Sehingga itu statusnya menjadi jelas? Kan itu, Yang Mulia, ya?

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan inkraacht-nya? Pada waktu PN kan belum inkraacht. Pada waktu PP kan belum inkraacht. Inkraacht-nya setelah ada putusan kasasi, kan begitu? Coba dijelaskan itu!

170. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Inkraacht-nya ... siap, Pak! Siap, Yang Mulia!

171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu satu, kemudian yang kedua, ini kan Saudara me ... apa namanya ... bertiga ini, Prinsipal ini sepertinya mengamanatkan dari kepentingan siapa, begitu ya? Apakah ada Kuasa dari Paslon Nomor Urut 1 terhadap bertiga ini? Ada Kuasa?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dari Paslon Nomor Urut 1 ada Kuasanya, Bapak? Ada, ya?

173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada, Pak.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada.

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari Paslon Nomor Urut 1?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada. Ya.

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Paslon Nomor Urut 1 ini?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dari Paslon Nomor Urut 1, Pak Hendrajoni dan Pak Hamdanus.

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan, dari ini ... ya, betul, Nomor Urut 1 kan yang pemenang kedua, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pemenang kedua.

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, jadi ada? Ada surat kuasanya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, kenapa enggak mereka yang langsung memberi kuasa, memberi kuasa? Ada di sini dilampirkan surat kuasanya? Ibu jangan asal menjawab! Coba ditanya Prinsipalnya! Ada kuasanya itu?

186. PEMOHON: M. HUSNI

Mohon izin, Yang Mulia, sebetulnya kami bagian dari masyarakat (...)

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu, bukan itu pertanyaannya! Saudara punya kuasa, enggak?

188. PEMOHON: M. HUSNI

Tidak.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak. Itu jelas, ya.

190. PEMOHON: M. HUSNI

Jadi, kami memberikan kuasa kepada Bu Henny.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu sudah tahu, di sini ada. Yang saya tanya apakah dari ini ... kepentingan dari Nomor Urut 1, kan begitu, ya? Saya mau bertanya, kan Saudara ada hubungan apa dengan Nomor Urut 1? Saudara, family, atau apa namanya ... apa istilahnya itu, pendukung?

192. PEMOHON: M. HUSNI

Saya di partai.

193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tim sukses?

194. PEMOHON: M. HUSNI

Saya di partai.

195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tim sukses?

196. PEMOHON: M. HUSNI

Bukan, jadi saya ada pengurus partai di provinsi.

197. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi itu saja. Jadi, artinya begini, ya, Pak, ya. Artinya saudara itu kalau mau mengatasnamakan masyarakat itu yang objektif, begitu lho, jangan karena untuk kepentingan Nomor 1 di sini petitumnya jelas, agar dibatalkan sehingga Nomor 1 yang menang. Itu perlu juga harus ditegaskan. Karena toh juga legal standing Bapak kan masih dipertanyakan, begitu ya.

Nah, yang terakhir, ini harus jelas, ya karena ada di putusan sela. Dalam putusan sela ini mohon membatalkan pelantikan. Saya mau tanya sudah dilantik atau belum?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah, Pak.

199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kalau sudah bagaimana? Kenapa di sini ragu? Ini sudah enggak objektif lagi.

200. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Karena statusnya beliau sudah terpidana, Pak.

201. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana?

202. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Yang Mulia, statusnya beliau sudah terpidana.

203. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi kalau sudah terpidana itu kapan?

204. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sejak (...)

205. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu kan menurut Saudara, ya, betul.

206. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sejak 24 Februari ditolak, berarti dari PT dia sudah terpidana, Pak, dari Juni dia sudah terpidana.

207. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, itu, Bu, harus jelas, ya harus mengerti bagaimana status orang terpidana, bagaimana orang masih tersangka. Karena di undang-undang ini yang disebut terpidana, ya, disebut di situ, di Pasal 7 itu, ya. Jadi, ini juga, ini kan harus jelas, harus objektif, sudah dilantik apa belum? Itu sekali lagi pertanyaan saya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah dilantik, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kapan? Kapan?

210. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dilantik ini ada undang-undangnya waktu setelah (...)

211. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Enggak, saya mau tanya, kapan dilantik menurut sepengetahuan daripada Pemohon?

212. PEMOHON: M.HUSNI

Bisa saya bantu.

213. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

214. PEMOHON: M.HUSNI

Putusan kasasi (...)

215. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Bukan itu yang saya tanya!

216. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

217. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Ini sudah ada putusan kasasi, sudah ada.

218. PEMOHON: M.HUSNI

Dilantik 20 (...)

219. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Yang saya tanya (...)

220. PEMOHON: M.HUSNI

26 Februari.

221. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Ini notoire feiten ini, pengetahuan umum kan?

222. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

223. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kapan dilantik?

224. PEMOHON: M.HUSNI

26 Februari 2021.

225. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

26 Februari 2021?

226. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

227. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Putusan Mahkamah ... Mahkamah Agung?

228. PEMOHON: M.HUSNI

24 Februari.

229. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

24.

230. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

24?

231. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Februari.

232. PEMOHON: M.HUSNI

Februari 2021.

233. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Februari 2021.

234. PEMOHON: M.HUSNI

Di-input online 25 Februari 2021.

235. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, menurut pengetahuan Saudara, Pak Rusman CS ini ... Pak Rusma, ya?

236. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

237. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Sudah dilantik 26 Februari 2021?

238. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

239. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Nah, putusan Mahkamah Agungnya tertanggal 24 Februari 2021?

240. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

241. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Kapan diketahui oleh (...)

242. PEMOHON: M.HUSNI

Diketahui di-input online tanggal 25 Februari 2021.

243. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Oh, diketahui 25 Februari?

244. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

245. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Kenapa enggak terus dilapor?

246. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah lapor, Pak.

247. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Oh.

248. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada di bukti-buktinya, sudah dilaporkan.

249. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Oh, begitu, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya. Ke KPU dilaporkan, ke Bawaslu dilaporkan.

251. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Tapi tetap dilantik, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tetap dilantik.

253. PEMOHON: M.HUSNI

Tetap dilantik. Itu ... itu cikal bakal rusuhnya (...)

254. HAKIM ANGGOTA: MAHANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Itu nanti sudah substansi, ya. Tapi ini masih nanti. Kita terima dulu nanti tanggapan dari Pihak Termohon dan pihak yang lain nanti.

Terima kasih, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

256. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon, ini walaupun belum masuk pada substansi, ya, tapi mungkin perlu juga diberi informasi ke kami terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, tadi terkait dengan pemahaman Pemohon bahwa Bupati yang sekarang sudah dilantik, ya?

257. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah dilantik, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Sudah dilantik tanggal 26 (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

26 Februari.

260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Februari.

261. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

2021.

262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, dalam pemahaman Pemohon bahwa beliau sudah terpidana, ya?

263. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terpidana.

264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Sejak putusan pengadilan negeri?

265. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Kasa ... Kasasi.

266. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bukan?

267. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pengadilan negeri juga sudah terpidana. Pengadilan tinggi terpidana.

268. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya.

269. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dia naik ke kasasi.

270. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, oke. Ini saya coba ikut pola pikir Pemohon, ya, kan. Dan juga harus diingat bahwa dalam asas hukum itu ada yang dikenal dengan nama asas praduga tak bersalah, ya. Supaya ini ... ini ... pemahaman Pemohon. Saya coba ikuti alur pemahaman Pemohon.

Nah, dalam proses itu, selama dia belum terpidana, dia masih punya hak, ya. Dia masih punya hak. Tapi, kalau Pemohon berpandangan bahwa dia sudah terpidana, itu berarti sudah mengabaikan asas praduga tak bersalah. Itu berarti mungkin pakai a contrario praduga bersalah. Karena dengan asumsi sudah ada putusan

pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Sementara kan dia punya hak. Ada upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada yang bersangkutan untuk menggunakan upaya itu. Kalau dia merasa ada ketidakadilan, dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum.

Nah, dalam proses itu, semestinya dia belum terpidana. Terpidana itu harus dalam pemahaman sudah inkrah. Selama itu belum inkrah, maka harus tetap asas praduga tak bersalah. Ya, ini nih. Saya coba ikuti pola pikir Pemohon biar ada pemahaman yang sama dulu.

Yang berikut tadi, Pemohon mengatakan bahwa ini masyarakat pemantau. Mungkin nanti KPU (Termohon) akan menjawab regulasi yang terkait dengan syarat legal standing bagi pemantau. Jadi nanti ... nanti ini ... tadi makanya Yang Mulia Pak Ketua mengingatkan Permohonan mana yang mau dipakai karena ada 3. Permohonan pendahuluan, perbaikan pertama, dan kedua. Tadi Pemohon mengatakan bahwa yang dipakai yang kedua. Dengan alasan baru mendapat petikan, ya, petikan dari Mahkamah Agung. Itu nanti hak Termohon untuk menjawab, dasarnya yang mana, ya, tapi tadi Yang Mulia Pak Ketua mengingatkan yang mana dijadikan ... yang mau dibacakan pada kesempatan ini.

Kemudian gini. Pada waktu Pemohon mengetahui bahwa pada tanggal 4 Februari ada penolakan dari Mahkamah Agung, ya?

271. PEMOHON: M.HUSNI

24, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

4 Februari apa 24?

273. PEMOHON: M.HUSNI

Ya. 24 Februari putusan.

274. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, putusan petikannya kan?

275. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

276. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Tapi sudah mengetahuinya itu kan sebelumnya, ya?

277. PEMOHON: M.HUSNI

Mengetahuinya setelah di amar putusan di-input online tanggal 25 Februari.

278. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Online itu 25 Februari?

279. PEMOHON: M.HUSNI

Ya.

280. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Kemudian dapat petikannya tanggal berapa?

281. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Petikannya dapat waktu perbaikan kedua, Pak ... perbaikan ketiga.

282. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, tanggal berapa? Tanggal berapa itu?

283. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tanggal 20 ... 19, ya? 19 ... tanggal 19.

284. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

19 dapat petikannya?

285. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Petikannya.

286. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, setelah Pemohon mendapat petikan, upaya apa yang dilakukan Pemohon? cukup bersurat ke KPU, dan Bawaslu, atau ada upaya lain yang dilakukan?

287. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tanggal 24 Februari, MA sudah memutuskan kasasi ditolak. Berarti tanggal 26 Februari itu, tanggal 25 kami setelah mendapatkan bukti online, kami sudah bersurat ke mana-mana, ke KPU, ke Bawaslu, ke seluruh instansi terkait, ke otda, ke Mendagri (...)

290. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Tanggal 25, Pemohon bersurat, ya?

291. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, kami. Saya langsung mengantarkan sendiri.

292. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Yang bersurat Pemohon atau Prinsipal Pemohon ini?

293. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Prinsipal ... Prinsipal ini bersurat ke mana-mana.

294. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Atau pasangan calon yang sebelumnya yang ... yang mengikuti pilkada ini? Yang ajukan Permohonan, siapa?

295. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Yang Permohonan bersurat itu dari lawyer-nya.

296. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, dari lawyer-nya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Lawyer ini dia atas nama siapa? Mendapat kuasa dari siapa?

299. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Dari Bapak Hendrajoni dan Pak Hamdanus.

300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, Pak Hendrajoni ini siapa ini?

301. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Calon Nomor 2.

302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Pasangan Calon Nomor 2?

303. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Nomor Urut 2.

304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nomor 2 apa Nomor 1, Bu?

305. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Eh, Nomor 1. Minta maaf, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, oke. Ibu tahu ada berapa pasangan calon kemarin?

307. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ada tiga, Pak (...)

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ada tiga pasangan?

309. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Yang Mulia, ya.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, dari tiga itu, yang mengajukan surat ini memberikan kuasa kepada ... tadi Kuasa Hukum siapa namanya?

311. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Henny Handayani dan (...)

312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bukan, sebelumnya Bu Henny yang bersurat memang Bu Henny juga atau (...)

313. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, saya yang bersurat.

314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke.

315. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Jadi, Bu Henny ini mendapat kuasa dari pasangan calon (...)

317. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Calon (...)

318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nomor 1?

319. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Nomor 1.

320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nomor 1. Kemudian, sudah dilakukan persuratan kepada misalnya KPU?

321. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

KPU, Bawaslu.

322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bawaslu.

323. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah diterima, ada buktinya juga.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Itu diterima tanggal berapa, Bu?

325. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tanggal 25 juga karena saya langsung datang sendiri ke sana.

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ke KPU di Pesisir Selatan?

327. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ke KPU (...)

328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Atau KPU pusat?

329. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ke KPU pusat.

330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, KPU pusat?

331. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

KPU pusat, ya.

332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Apa isi suratnya? Minta dibatalkan atau?

333. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Isi suratnya karena sudah ada bukti online, maka minta dibatalkan pelantikannya, minta ditunda, Pak Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, jadi surat itu dasarnya karena hanya bukti online?

335. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Bukti online.

336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Tapi petikannya belum?

337. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Petikannya belum. Karena bukti online itu di situ tertulis di bawahnya sama dengan yang se ... et ... adalah sama dengan yang ada di sidang, gitu. Jadi, benar-benar ditolaknya itu sama dengan yang sudah disidangkan. Jadi, persis karena bukti online itu resmi dari Mahkamah Agung.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Nah, pada waktu itu, Saudara menerima kuasa dan mengajukan surat ke KPU pusat, ya?

339. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Lalu, diterima langsung pada hari itu?

341. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Kemudian, ke Bawaslu juga?

343. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ke Bawaslu juga.

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ke Bawaslu juga. Bawaslu pusat, atau Bawaslu di provinsi, atau kabupaten?

345. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Bawaslu pusat, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bawaslu pusat?

347. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Diterima hari itu juga?

349. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Hari itu juga.

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Lalu, sudah tahu ada prosesnya?

351. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah. Ke otda juga, ke Mendagri juga.

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Mendagri kapan suratnya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sama, tanggal 25 juga.

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Tanggal 25. Jadi, tanggal 25 itu semua ke KPU, Bawaslu (...)

355. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Semua, KPU, Bawaslu (...)

356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Mendagri?

357. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Mendagri.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Langsung Mendagri atau ke ... lewat dirjen otdanya?

359. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Langsung ke Mendagri dan dirjen otda juga.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

CC-nya atau suratnya ke Mendagri, tapi diserahkan ke dirjen otda?

361. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Di Kemendagri juga di bagian persuratannya juga. Ke dirjen
otdanya di bagian persuratannya juga. Langsung bertemu dengan dirjen
otdanya tanggal 25.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oh, bertemu dirjennya?

363. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, langsung.

364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Pada hari itu juga?

365. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pada hari itu juga.

366. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Apa ... apa pesan pak dirjen pada waktu pertemuan itu?

367. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Pesan pak dirjen, ya karena di sini beliau hanya meneruskan
perintahnya KPU, ya, gitu.

368. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Meneruskan?

369. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya.

370. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ibu tahu, enggak, SK Mendagri untuk pelantikan Bupati atau Wali
Kota di Sumatera Selatan itu tanggal berapa?

371. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Tanggal 26, Yang Mulia.

372. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Coba dilihat dulu, Bu, tanggalnya! Pelantikannya 26, tapi tanggal SK-nya tanggal berapa, Bu?

373. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Nomor 30/PL.02-7/PU/130-KPU-Kabupaten/II/2021.

374. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Bukan. Ibu coba lihat SK Mendagri dari Pak Tito Karnavian, itu tanggal berapa SK-nya itu keluar?

375. PEMOHON: M. HUSNI

SK-nya ... kalau pengantarnya tanggal 25.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. SK-nya?

377. PEMOHON: M. HUSNI

SK-nya tanggal 24 Februari 2021.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Nah, itu tanggal 24, kan?

379. PEMOHON: M. HUSNI

Ya.

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Tapi, pada waktu itu minta ada permohonan supaya itu tidak dilantik tanggal 26 itu?

381. PEMOHON: M. HUSNI

Betul.

382. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Supaya ditunda (...)

383. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

SK-nya sudah ada, ya?

384. PEMOHON: M. HUSNI

Sudah.

385. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Sudah ada.

386. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ada ... ada langkah lain selain ke MK oleh Pemohon? Ya, saya tidak ... tidak mau mengarahkan harus ke mana, tapi ada ... ada langkah yang lain selain ke MK?

387. PEMOHON: M. HUSNI

Sementara ... izin, Yang Mulia, sebagai tambahan. Saya selaku Prinsipal walaupun nanti Legal Standing-nya tergantung dari Majelis Hakim Yang Mulia karena ini perlu saya sampaikan juga. Dimana sebuah proses kasasi yang kami lihat, ini sangat melanggar aturan. Dimana proses kasasi ini, berkas ini, sudah dikirim oleh pengadilan pe ... pengaju, 17 Juni 2020 ke ... ke Mahkamah Agung.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mas, maskernya dipakai!

389. PEMOHON: M. HUSNI

Izin, ya, Pak.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita masih tetap bisa dengar suaranya.

391. PEMOHON: M. HUSNI

Izin, Pak. Izin.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kasian Bu Henny itu.

393. PEMOHON: M. HUSNI

17 Juni 20 ... 2020 berkas dikirim oleh Panitera Mahkamah Agung ... eh, panitera pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung. Tanggal 29 Juni berkas diterima di Mahkamah Agung. Tanggal 29 Juni 2020 berkas sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Nah, kami karena memantau itu, berkas ini tidak diproses sebagaimana diatur oleh KUHAP. Mengapa melanggar Pasal 250, baik ayat (1) sampai ayat (5)? Sehingga, berkas ini diregistrasi 5 Januari 2021, sehingga ada ... ada berkas ini disimpan di situ. Diregistrasi 5 Januari 2021, didistribusi 26 Januari 2021, di ... disidang 24 Februari 2021, di-input online 25 Februari 2021, yang bersangkutan di ... di ... dilantik 26 Februari 2021.

Jadi, ini saya melihat sebuah proses kasasi yang nyata-nyata melanggar aturan KUHAP yang seharusnya itu dipatuhi. Demikian.

394. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Oke. Kami tidak berwenang untuk menilai proses di MA, ya. Itu ranah yang berbeda, ya, kami tidak akan masuk ke sana. Itu silakan hak masyarakat untuk menilainya, tapi kami tidak akan ke sana. Karena yang saya fokus tadi adalah SK Mendagrinya, kapan? Kemudian, sepengetahuan Pemohon terkait dengan putusan MA ini, kapan? Kemudian prosesnya. Kalau saya dengar cerita ... rangkaian cerita tadi bahwa prosesnya 25, ya? SK-nya, kan sudah 24?

395. PEMOHON: M. HUSNI

Ya.

396. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ada niat baik masyarakat terkait dengan situasi kasus ini dengan harapan bisa dibatalkan, SK-nya kan sudah diturunkan, ya?

397. PEMOHON: M. HUSNI

Ya.

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Ya, ada memang asas ab ovo dan sebagainya terkait dengan kalau misalnya belum dilantik. Tetapi kita tidak masuk ke situ, itu ranah ... bukan ranah MK di situ.

Nah, ini yang kami perlu kejelasan supaya Pemohon juga mengerti, ya. Bahwa pada ... Pemohon berpandangan bahwa itu sudah terpidana itu, pandangan Pemohon, ya? Tetapi regulasi ini sebenarnya jelas, tadi Pemohon mengatakan berharap MK sebagai positive legislator. Nanti DPR, Presiden, marah ini, MK ambil alih kewenangan itu. Dalam hal-hal tertentu boleh, ya, tetapi kewenangan itu pada DPR dan Presiden terkait dengan pembentuk undang-undang. Kecuali misalnya, ada kevakuman seperti dalam Permohonan ini, bisa. Tetapi, ini kan sebenarnya karena pemahaman Pemohon seolah-olah sudah terpidana, itu yang kemudian merasa bahwa ini ada kevakuman hukum, ya. Ini ... ini perlu supaya ... karena ini ... sidang ini terbuka untuk umum biar masyarakat juga tahu, pemahaman yang benar seperti apa nanti, ya?

Saya kira untuk sementara cukup, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Sekarang saya lanjutkan, saya juga akan meminta penjelasan, klarifikasi, baik kepada Pemohon maupun kepada Pihak Termohon, ya. Pihak Termohon itu menetapkan pasangan calon, kapan?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Izin, Yang Mulia.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Penetapan pasangan calon itu ditetapkan oleh Termohon ketika menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon pada (...)

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu?

404. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

23 September 2020, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT

23 Desember (...)

406. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

September.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT

September 2020?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah pada waktu itu tahu kalau ada kasus pidana yang menyangkut salah satu pasangan calon yang ditetapkan?

410. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya. KPU sudah melakukan klarifikasi ke beberapa instansi dan sudah mendapatkan informasi (...)

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Tapi masih dalam status pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung pada waktu SK penetapan pasangan calon (...)

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah putusan pengadilan negeri dan kemudian sudah ada putusan Pengadilan Tinggi di Padang?

414. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tapi belum inkraht?

416. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Belum, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena putusannya kasasi kapan menurut KPU?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

24 Februari 2021. Jadi (...)

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT

24 Februari 2021?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anda menetapkannya pada September 2020, ya?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Anda menetapkan waktu itu pasangan calon yang namanya Pak Rusma itu masih berstatus tersangka, ya, berarti, ya?

424. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum terpidana?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Belum terpidana.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum inkracht, kan?

428. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Belum, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, masih tetap mempunyai kewenangan ... apa ... mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kemudian, Anda sekarang mengetahui putusan Mahkamah Agung kapan itu? 24 Februari?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya, benar, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Itu pun juga dari Permohonan Pemohon sebenarnya.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ini saya pegang, tapi auto text-nya saya tidak tahu, ya, nanti kan ... anu ... ini ada bukti yang diajukan oleh Pemohon, P-5. P-5 itu begini, ternyata kasasi itu masuk ke Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2021.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Ya.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, berkas itu didistribusikan oleh panitera di Mahkamah Agung, panitera pengganti kepada tiga orang hakim untuk diperiksa. Distribusi ... didistribusikan pada tanggal 26 Januari 2021, ya? Terus, kemudian di situ statusnya sudah diputus. Kapan diputus? Putusan itu 24 Februari 2021. Jadi, apa yang dikatakan Termohon betul bahwa Termohon belum melihat pada waktu penetapan pasangan calon, yang bersangkutan belum berstatus terpidana, gitu ya, toh?

438. KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini fakta yang ada berdasarkan bukti. Malah bukti ini yang diajukan adalah Pemohon, ya. Jadi, mohon untuk dipelajari kembali, Bu Henny? Apa yang dimaksud dengan terpidana? Apa yang dimaksud dengan terdakwa, ya? Anda mengatakan bahwa sejak pengadilan negeri itu sudah terpidana, padahal putusan itu tadi, Pak Daniel, saya, dan Pak Manahan juga sudah menyampaikan, "Yang namanya proses peradilan, itu ada asas hukum praduga tak bersalah. Kalau belum ada putusan pengadilan yang bersifat inkraacht berarti yang bersangkutan dianggap tidak bersalah."

Lah, KPU itu menganggap yang namanya Pak Rusma ini belum bersalah sehingga dia masih mempunyai hak sebagai warga negara untuk ditetapkan menjadi pasangan calon, kan gitu ya, Termohon, ya? Bawaslu tahu itu, betul itu?

440. BAWASLU: ERMAN WADISON

Ya, Yang Mulia, kita mengikuti laku pengawasan.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

442. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia?

Tanggal 24 Februari, MA kasasi putus berarti sejak di PT, sejak Juni, Drs. Rusma Yul Anwar sudah berstatus terpidana karena kasasinya ditolak.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya. Ini coba pelajari hukum lagi, asas hukum lagi.

444. PEMOHON: M.HUSNI

Sedikit?

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

446. PEMOHON: M.HUSNI

Sepanjang masih ada upaya hukum bagi sebuah putusan dalam pengadilan itu tentu kembali ... kembali ke terdakwa karena saat dia mengajukan upaya hukum (...)

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, penafsiran hukum Anda, ya, tapi nanti kita menilai yang mana.

448. PEMOHON: M.HUSNI

Ya, tapi untuk pengadilan negeri (...)

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya saya bilang begini (...)

450. PEMOHON: M.HUSNI

Dia mengajukan kasasi.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setop, setop, setop!

452. PEMOHON: M.HUSNI

Siap.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya, silakan Anda berpendapat begitu, silakan Anda berpendapat kayak apa, Bawaslu bagaimana? Nanti Hakimlah yang menilai. Makanya tadi saya pesan, Bu Henny tolong dipelajari kapan inkracht-nya seseorang dinyatakan itu. Pelajari lagi asas-asas hukum, ya. Ini pengetahuan hukum yang umum sebetulnya.

Baik kalau begitu, kita sudah mencoba untuk meminta klarifikasi. Jadi, ada hal-hal yang harus semuanya sudah ... nanti terungkap pada persidangan dan Mahkamahlah yang akan menilai, ya? Baik. Kalau begitu, begini. Saudara Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-35, betul? Dihidupkan! Biar terekam. Dihitupkan itunya, miknya!

454. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Betul sekali, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul? Tapi ini ada masalah. P-4, P-6, P-8, P-10, P-11, P-13 daftar alat bukti tidak sesuai dengan bukti fisiknya. Yang dipakai bukti fisiknya?

456. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Bukti fisiknya sudah saya berikan dan sudah ada tanda terima sesuai dengan yang saya berikan, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Maksudnya, setelah diverifikasi, ya, itu ternyata daftar alat bukti tidak sesuai dengan alat buktinya. Jadi, daftar alat bukti mengatakan a, tapi bukti fisiknya ternyata b, gitu loh.

458. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin?

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Daftarnya mengatakan P-1 ... ini P-4 sama dengan a, itu daftar buktinya. Tapi setelah dicek di sini P-4 itu bukan a, tapi b.

460. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia, waktu penerimaan alat bukti. Itu ada petugasnya juga dan sudah diperiksa, Yang Mulia, izin semua sudah sesuai, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak sesuai, ini loh, sudah dicek ini loh. Maju, maju sini! Maju sini, coba sini!

462. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Saya (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Kamu itu kok ... betul ini. Miknya, miknya tolong. Cek ini! Daftarnya yang ini, ya, ini kan daftarnya. Bukti fisiknya ini, coba cocokkan ... enggak. Cocok, enggak? Kalau di sana itu ngeceknnya cuma ini sudah ... apa namanya ... sudah dileges apa belum? Kalau sudah dileges, sudah.

464. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia, ininya saya ada buktinya di ... di HP ada yang drafnya itu.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini loh, Anda itu membuat daftar alat bukti ini, kan? Ya, ini kan? Ini daftar alat bukti asli, ini Anda menyatakan P-4. Ini P-4, P-4 itu berupa apa di sini? Ternyata enggak sama antara keterangan yang di sini dengan ini, gitu loh.

466. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia, ini bukan yang ini ... punya saya ada alat bukti. Ini (...)

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana? Daftar alat buktinya bawa sini!

468. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Ya, sebentar.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Contoh lagi ... contoh yang lain lagi, yang P berapa itu? Diambilkan! Ini kan daftar bukti yang Anda sampaikan kan daftar buktinya itu, ini, ini alat buktinya. Setelah dicocokkan, ini beda dengan apa yang ada di sini, begitu lho. P-4 sama. Mestinya kan judulnya ini masuk di sini, tapi ini ternyata beda.

470. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Kalau memang seperti ini, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki, Yang Mulia.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu, begini ... ya, begitu. Saudara mengakui begitu, enggak ada masalah. Silakan duduk!

Jadi begini, pada kesempatan sidang kali ini, ya, ini masih diberi kesempatan untuk memperbaiki setelah ini, gitu lho, ya?

472. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan B ... Bukti P-1 sampai dengan P-35, untuk P-4, P-6, P-8, P-10, P-11, dan P-33 ini karena enggak cocok, silakan nanti diperbaiki, supaya dicocokkan begitu kan? Nanti Anda menghubungi Kepaniteraan. Begitu, jangan ngeyel.

474. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Kalau begitu kan enak. Tapi bagus Anda itu, nanti kariernya di bidang advokat bagus, Anda pejuang itu berarti. Ya, ngeyelan itu modal bagus itu. Jadi, saya sudah pengalaman jadi hakim kalau ada yang begitu itu bagus, ya.

476. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terima kasih, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Semoga sukses nanti.

478. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terima kasih, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang saya sahkan P-1 sampai dengan P-35, kecuali P-4, P-6, P-8, P-10, P-11, dan P-33 akan disesuaikan. Nanti daftar buktinya disesuaikan dengan bukti fisiknya, gitu, ya?

480. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Siap, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Enak gitu. Tapi bagus modalnya tadi. Ya, Yang Mulia?

Baik, kalau begitu sidang pada pagi hari ini, ya, sudah cukup. Kemudian, sidang akan ditunda sampai hari Senin, 29 Maret 2021, pada pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, ya, dan mengesahkan alat buktinya. Pada persidangan ini tidak ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari para pihak, ya. Karena agenda atau jadwal untuk menjadi pihak terkait sudah lewat, jadi tidak ada, ya.

Baik, saya ulangi kembali. Persidangan yang akan datang ditunda sampai hari Senin, 29 Maret 2021, pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti, juga termasuk nanti yang diperbaiki itu, ya.

Baik, ada yang akan disampaikan?

482. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

484. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Izin, Yang Mulia. Untuk masalah misalnya beliau diberikan kuasa oleh Bapak Hendrajoni dan Bapak Hamdanus, bisa ditambahkan sebagai alat bukti, Yang Mulia?

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terserah Saudara akan menambahkan apa pun nanti akan kita terima dan akan kita nilai. Ya?

486. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY HANDAYANI

Terima kasih, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada Termohon, cukup? Baik, Bawaslu cukup? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL, 10:13 WIB

Jakarta, 23 Maret 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

